

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, adapun jenis-jenis perbankan terbagi kedalam tiga jenis yaitu, Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998:2).

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan wadah yang dimana para investor dapat melihat perkembangan perusahaan melalui kegiatan yang tercantum dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan secara berkala, Informasi yang terkait dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dan telah listing pada website Bursa Efek Indonesia.

Terdapat sejumlah 41 perusahaan perbankan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia yang terdapat dalam laporan Tahunan Bursa Efek Indonesia. Tabel yang tersaji dibawah ini merupakan daftar emiten yang menjadi objek penelitian sebanyak 6 perusahaan perbankan.

Tabel 1. 1 Daftar Emiten Perbankan

No.	Nama Perusahaan
1.	Bank CIMB Niaga Tbk.
2.	Bank Maybank Indonesia Tbk.
3.	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5.	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

(Sambungan)

6.	BPD Jawa Timur Tbk.
----	---------------------

Sumber: Laporan tahun Bursa Efek Indonesia data diolah penulis, 2018

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya di sektor perekonomian. Perekonomian Indonesia yang semakin baik didorong oleh serangkaian kebijakan yang pro-aktif telah membantu bertahannya perekonomian Indonesia, termasuk kebijakan moneter yang penuh dengan kehati-hatian, bertambahnya investasi infrastruktur oleh pemerintah dan reformasi kebijakan untuk memperkuat iklim investasi. Namun, terjadi peningkatan risiko terhadap perekonomian yang meningkat baik itu risiko Internasional maupun domestik. (Laporan perekonomian Indonesia, 2016).

Tak dapat dipungkiri, seiring dengan meningkatnya perekonomian, risiko Internasional dan domestik pun ikut meningkat. Perusahaan dituntut untuk memperhatikan seluruh kegiatan yang dilakukan termasuk masalah keuangan yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan dan berkaitan dengan sumber dana serta penggunaannya. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003). Hal senada dikemukakan oleh Calbury Committee (2003), *A set of rules that define a relationship between shareholders, manager, creditor the goverment, employees and other internal and external stakeholder in respect to their and responsibilities.*

Mengutip dari berita bertajuk *GCG Bukan Keharusan, Tapi Kebutuhan* pada situs beritasatu.com, Muliaman Hadad selaku ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bukan lagi menjadi keharusan, melainkan kebutuhan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnis. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perbaikan *governance* sangat menentukan minat

investasi. Muliaman menjelaskan, penerapan GCG dinilai mampu menarik minat investor untuk menanamkan nilai investasinya maupun perbankan untuk memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. “Untuk itu, penerapan GCG pun sepatutnya bukan lagi dianggap sebagai keharusan, melainkan kebutuhan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis.”

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus *Institute for Corporate Directionship* (IICD) Sigit Purnomo menuturkan, selama ini isu GCG dinilai kurang menarik dibandingkan isu lainnya. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih jauh dibawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Singapura dan Malaysia. “Kita hanya unggul diatas Vietnam. Karena itu sama-sama harus kita perjuangkan supaya perusahaan-perusahaan Indonesia sejajar dengan perusahaan ASEAN lainnya.” terang Sigit. Guna menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain, Sigit menyebutkan, menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membenahi implementasi dan penerapan GCG di masing-masing. Belum adanya kesadaran akan nilai dan praktek dalam menjalankan kegiatan bisnis menjadi penyebab lemahnya penerapan GCG. Maka dari itu, dengan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan (Ferial et al, 2016:147).

Tujuan penerapan GCG pada perbankan yaitu untuk memaksimalkan kinerja dan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, serta turut mensukseskan program perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan pembiayaan dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan (Ferial et al, 2016:148).

Penerapan GCG sangat dibutuhkan oleh seluruh kelangsungan kegiatan dalam perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penerapan GCG pada bidang perbankan diatur oleh Bank Indonesia. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga dapat memberikan kontribusi dengan menggunakan sektor riil guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, GCG sektor perbankan sangat penting diterapkan. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara prinsip juga mengatur aspek GCG, seperti *Good Corporate Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* (Peraturan Bank Indonesia, 2006:27).

Dalam beberapa tahun terakhir, cukup banyak perusahaan yang menyadari pentingnya menerapkan GCG sebagai bahan dari salah satu strategi bisnisnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan menjadi faktor munculnya masalah *Corporate Governance*. Pemisahan ini didasarkan pada teori Agensi/Keagenan (*Agency Theory*) yang dimana menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Menurut Eishendart (1989), teori keagenan (*Agency Theory*) ditekankan untuk mengatasi konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam seluruh bentuk kegiatan bisnis yang berdampak merugikan *stakeholder*. Komisaris adalah organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (UU No. 1 tentang Perseroan Terbatas, 1995:17). Hal tersebut menjadi hal yang mendasari bahwa komisaris independen lebih memiliki peran dan kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi *equity* mereka.

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (2004:1), krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Menurut Darmawi (2012), perbankan memegang peran dan tugas yang penting dalam melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai jantung dari perekonomian negara, tugas perbankan menghimpun dana dari tabungan masyarakat, menyediakan dana untuk

dipinjamkan (kredit), menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, menciptakan uang giral, menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri dan menyediakan jasa-jasa *trusty* (wali amanat). Pentingnya peran dan tugas bank dalam perekonomian mengharuskan perbankan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat (Pedoman GCG Perbankan Indonesia, 2004:2). Oleh karena itu, *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Keberlangsungan dapat dicapai dengan lahirnya suatu konsep yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Totok Mardikanto (2004:94), *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekeliling-nya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan *stakeholders*, serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham. CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan perusahaan saja, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Handriyani, 2013:1).

Namun terkadang perusahaan melalaikan tuntutan tanggung jawab sosial tersebut dengan alasan bahwa *stakeholders* tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena hubungan perusahaan dengan

lingkungannya bersifat non *reciprocal*, yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik (Marissa, Diane dan Rizky, 2013). Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh budaya perusahaan yang dimana memaksimalkan keuntungan yang dilihat dari untung atau rugi, sedangkan keikutsertaan perusahaan dalam tanggung jawab sosial justru dianggap menambah biaya karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengolahan limbah, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan, *strict control* terhadap produk agar ramah lingkungan. Semuanya itu menambah biaya perusahaan yang akan mengurangi pembagian keuntungan (dividen) bagi investor (Marissa, Diane dan Rizky, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustriarini (2010) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Rustriarini (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa investor Indonesia telah mempertimbangkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga keutuhan informasi akan tanggung jawab sosial merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Jika perusahaan muncul dari kinerja perusahaan yang baik, maka akan muncul kepercayaan dari investor sehingga akan diikuti respon positif melalui peningkatan harga saham perusahaan.

Menurut peraturan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* juga merupakan salah satu informasi yang harus tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Adanya dasar hukum yang kuat mengakibatkan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang semula hanya pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) yang merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan menjadi pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*).

Untuk melaksanakan CSR perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya, yang pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra

perusahaan akan semakin baik dan berdampak pada loyalitas konsumen yang semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen yang semakin tinggi dan meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Sutopoyudo, 2009).

Oleh karena itu, CSR dinilai berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari situs online harian Republika pada Juni 2013, Bank Indonesia mendapati sebanyak empat bank yang tidak menerapkan GCG dan memberikan sanksi kepada keempat bank tersebut. Yang dimana keempatnya adalah PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Panin Syariah Tbk, PT. Bank Jabar Banten Tbk, dan PT. Bank Mestika Dharma. Menurut Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah, sanksi yang diberikan kepada keempat bank tersebut yaitu berupa pembatasan, dikarenakan keempat bank tersebut tidak menerapkan *Good Corporate Governance*. Pemberian sanksi berupa pembatasan tersebut termasuk kategori risiko operasional (Azzahrah, 2014:8). Letak pelanggaran keempat bank tersebut tidak terdaftar adanya kepemilikan manajerial. Menurut Muryanti dan Suardhika (2014:414), kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen. Pada tahun 2011, Bank Windu Kentjana Internasional telah melanggar peraturan Bank Indonesia tentang komposisi komisaris independen dan dimana pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006/ pasal 5 disebutkan bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris sedangkan Bank Windu Kentjana Internasional hanya memiliki kurang dari 50% yaitu 30% dari jumlah anggota dewan komisaris independen.

Menurut Retno (2012) nilai perusahaan tercermin dari harga nilai sahamnya, semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Dilihat dari aspek nilai perusahaan pada *historical price*, harga saham Bank Mega naik di awal tahun 2013 namun semakin menurun pada pertengahan

bulan Juni, begitupula dengan harga saham Bank Panin Syariah yang pada awal tahun 2013 mulai naik dan mengalami penurunan di pertengahan bulan Juni 2013, dan yang terakhir yaitu Bank Mestika Dharma, dimana penulis tidak dapat menemukan *historical price* saham bank ini pada tahun tersebut. Berdasarkan pada data yang tersaji diatas, terdapat ketidaksesuaian dengan teori diatas yang mengatakan bahwa semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran pemegang saham.

Banyak faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, yang mana penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan sendiri telah banyak dilakukan, antara lain kinerja keuangan suatu perusahaan, kebijakan *dividen*, *corporate governance*, harga saham dan lain sebagainya (Pertwi dan Pratama, 2012:119).

Menurut Ferial et al (2016:148), nilai perusahaan terkait dengan harga saham merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Harga saham suatu perusahaan tinggi berdampak pada nilai perusahaan yang tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan kepercayaan pasar, tidak hanya kinerja perusahaan di masa sekarang, tapi juga di masa depan Nilai perusahaan dapat dilihat melalui *Price Book Value* (PBV), PBV adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Menurut IMQ (*Indonesia Market Quotes*, 2011) PBV merupakan rasio yang sudah luas dipakai di berbagai analisis sekuritas dunia, yang dimana semakin rendahnya nilai PBV suatu saham maka saham tersebut dikategorikan *undervalued* yang sangat baik untuk memutuskan untuk investasi dalam jangka panjang. Namun rendahnya nilai PBV ini juga dapat mengindikasikan menurunnya kualitas dan kinerja fundamental emiten yang bersangkutan (*Fundamentally Wrong*).

Pada penelitian Handriyani (2013) juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Demikian pula pada penelitian Yuniarta dan Sinarwati (2014) yang menghasilkan bahwa *Corporate Social Responsibility* mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan secara positif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016)”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menandakan pentingnya perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Karena tujuan *Good Corporate Governance* pada perusahaan untuk memaksimalkan kinerja dan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, serta turut mensukseskan program perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan pembiayaan dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

Dewasa kini pun masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya, oleh karena itu para pelaku bisnis dituntut agar tidak hanya berorientasi dalam memaksimalkan laba tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar dalam bentuk penyisihan dana. Bentuk kontribusi positif tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan khususnya pada sektor perbankan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia, karena salah satu tujuan penerapan *Good Corporate Governance* untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pokok masalah yang akan diteliti, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Corporate Social Responsibility* dan Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
- 2) Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016?
- 3) Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016?
 - a. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *Price Book Value* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016?
 - b. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *Price Book Value* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016?
 - c. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdapat pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *Price Book Value* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *Price Book Value* pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terhadap pemahaman ilmu terutama dalam kajian asimetri informasi.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami mengenai *Good Corporate Governance* khususnya dalam Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional serta *Corporate Social Responsibility* pada nilai perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan berkaitan dengan suatu masukan untuk mengevaluasi kebijakannya dan berkaitan dengan nilai perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi Objek Penelitian

Lokasi resmi penelitian yang dipilih adalah website resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor perbankan. Dan penelitian diambil dari laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi BEI tahun 2012-2016.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Maret 2018. Periode penelitian menggunakan laporan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

1.8 Sistem Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait sehingga pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Secara garis besar, sistematika penulisan dibagi menjadi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data,

tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas, serta teknik analisis dan data pengujian hipotesis.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan peneliti terhadap masalah yang terjadi di dalam penelitian.